

18 KABUPATEN/KOTA DI JATENG RAIH INSENTIF FISKAL RP101,6 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/09/30/1000422882.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 18 kabupaten/kota mendapatkan dana insentif fiskal dengan total Rp101,6 miliar dari pemerintah pusat karena dinilai turut andil dalam keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

"Angka kemiskinan ekstrem di Jateng alhamdulillah mengalami penurunan menjadi di bawah 1 persen, yakni 0,89 persen. Dan kami diapresiasi oleh pemerintah pusat mendapatkan dana insentif fiskal," kata Sekretaris Daerah Jateng Sumarno di Semarang, Senin.

Dia mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng di Semarang.

Sebanyak 18 kabupaten/kota penerima dana insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu Kabupaten Magelang, Blora, Brebes, Cilacap, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kudus, Pati, Pemalang, Sukoharjo, Temanggung, Wonosobo, Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Salatiga.

Sumarno berharap, pemerintah kabupaten/kota tersebut dapat memanfaatkan secara optimal dana bantuan untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

"Ini bentuk apresiasi pemerintah pusat yang tujuannya untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di daerah-daerah yang mendapatkan insentif fiskal," katanya.

Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan semakin meningkatkan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan di Jateng, di antaranya melalui konvergensi program, perbaikan data untuk sasaran, kualitas implementasi program, dan mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, katanya, beragam program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tanggung jawab sosial perusahaan swasta maupun pemerintah, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo mengatakan jumlah penerima dana insentif fiskal pada 2024 lebih banyak dibandingkan dengan pada 2023 yang 10 kabupaten/kota.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif penurunan penduduk miskin di Jateng dalam 10 tahun terakhir.

Pada 2014, penduduk miskin tercatat 14,46 persen, pada 2024 turun menjadi 10,47 persen, diikuti penurunan angka kemiskinan ekstrem pada 2023 dari 1,1 persen menjadi 0,89 persen pada Maret 2024.

"Kondisi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menurunkan angka kemiskinan secara kolaboratif dan terpadu, termasuk kemiskinan ekstrem menuju nol persen di sisa waktu 2024," katanya.

Capaian dana insentif fiskal bagi 18 kabupaten/kota itu melengkapi penghargaan serupa yang diterima Pemerintah Provinsi Jateng dari pemerintah pusat pada pertengahan September 2024 yang sekitar Rp5,6 miliar. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/551787/18-kabupatenkota-di-jateng-raih-insentif-fiskal-rp1016-miliar>, "18 Kabupaten/Kota di Jateng Raih Insentif Fiskal Rp101,6 Miliar", tanggal 1 Oktober 2024.
2. <https://jatengprov.go.id/publik/turunkan-kemiskinan-18-kabupaten-kota-di-jateng-raih-insentif-fiskal-lebih-dari-rp101-miliar/>, "Turunkan Kemiskinan, 18 Kabupaten/Kota di Jateng Raih Insentif Fiskal Lebih dari Rp101 Miliar", tanggal 30 September 2024.

Catatan :

Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sebanyak 18 kabupaten/kota mendapatkan **dana insentif fiskal dengan total Rp101,6 miliar** dari pemerintah pusat karena dinilai turut andil dalam keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.

3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi